

PERSISTENSI *OLD PUBLIC ADMINISTRATION (OPA)* DALAM PRAKTEK PELAYANAN PUBLIK DI ERA *SOUND GOVERNANCE (SG)*

Lina Marliani^{1*}, R. Didi Djadjuli²
^{1,2} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : linamarliani@unigal.ac.id

ABSTRAK

Paradigma administrasi publik telah berkembang dari *Old Public Administration (OPA)* menuju *New Public Management (NPM)*, *New Public Service (NPS)*, *Good Governance (GG)*, hingga *Sound Governance (SG)*, namun praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih menunjukkan karakteristik OPA, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut tercermin dari prosedur pelayanan yang cenderung berbelit-belit, birokratis, kaku, kurang efisien, serta masih ditemukannya perlakuan yang berpotensi diskriminatif terhadap pengguna layanan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana karakteristik paradigma *Old Public Administration (OPA)* masih mewarnai praktek pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, sehingga analisis dilakukan berdasarkan berbagai referensi ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perkembangan paradigma administrasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik utama OPA, seperti struktur organisasi yang hierarkis, orientasi pada prosedur dan kepatuhan terhadap aturan, serta sentralisasi kewenangan, masih mendominasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Karakteristik tersebut berdampak pada rendahnya fleksibilitas birokrasi, terbatasnya responsifitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta munculnya persepsi ketidakadilan dalam pemberian layanan. Bertahannya praktek OPA di tengah berkembangnya paradigma *Sound Governance* menunjukkan bahwa transformasi administrasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berlangsung secara optimal.

Kata Kunci : Persistensi, *Old Public Administration*, *Sound Governance*, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The public administration paradigm has evolved from Old Public Administration (OPA) to New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), Good Governance (GG), and finally Sound Governance (SG); however, government administration practices in Indonesia—particularly regarding public service delivery—continue to exhibit OPA characteristics. This situation is reflected in service procedures that tend to be convoluted, bureaucratic, rigid, and inefficient, alongside instances of potentially discriminatory treatment toward service users. This study aims to analyze the extent to which OPA paradigm characteristics still influence public service practices within the government bureaucracy. Employing a descriptive-analytical method with a literature review approach for data collection, the study analyzes various scholarly references, regulations, and prior research relevant to the evolution of public administration paradigms. The findings

indicate that key OPA characteristics—such as hierarchical organizational structures, an orientation toward procedures and rule compliance, and centralized authority—continue to dominate various aspects of public service delivery. These characteristics result in low bureaucratic flexibility, limited responsiveness to public needs, and perceptions of unfairness in service provision. The persistence of OPA practices amidst the emergence of the Sound Governance paradigm suggests that the transformation of public administration in Indonesia has not yet fully proceeded in an optimal manner.

Keywords : *Persistence, Old Public Administration, Sound Governance, Public Service*
Send feedback.

A. PENDAHULUAN

Old Public Administration, selanjutnya disingkat OPA merupakan paradigma klasik dalam bidang administrasi publik, yang dipelopori oleh woodrow wilson (1887-1987). Wilson menyatakan bahwa bidang administrasi sama dengan bidang bisnis yang harus memiliki struktur, otoritas, pengendalian, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kebijakan dan memberikan pelayanan, yang dilaksanakan secara netral, profesional dan lurus agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan (Thoha, 2008:72).

Saat ini keberadaan paradigma OPA cenderung lebih dominan dibandingkan dengan paradigma yang lebih populer yakni paradigma *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), *Good Governance* (GG) dan paradigma *Sound Governance* (SG). Paradigma *Old Public Administration* (OPA) lebih menekankan pada cara kerja birokrasi yang bersifat hierarkis, berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, menekankan pemisahan yang tegas antara ranah politik dan administrasi, serta lebih memprioritaskan efisiensi internal organisasi dibandingkan pemenuhan kepuasan maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, paradigma *Sound Governance* (SG) mengembangkan konsep

tata kelola yang lebih komprehensif daripada sekadar penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Paradigma ini menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan yang adaptif, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis,

OPA dalam praktek penyelenggaraannya lebih menekankan pada instansi/lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan. Adanya prosedur dan aturan ditujukan agar pengawasan terhadap pejabat/birokrat lebih efektif, namun dalam pelaksanaannya cenderung kaku, tidak fleksibel sehingga dianggap kurang responsif, berbelit-belit bahkan diskriminatif yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan karakteristik yang identik dengan ciri *Old Public Administration* (OPA). Namun di sisi lain karakteristik OPA memiliki sejumlah sisi positif yang tetap relevan dalam konteks tertentu, terutama untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan jaminan kepastian hukum.

Meskipun saat ini paradigma administrasi publik berkembang kearah *Sound Governance*, namun paradigma klasik (OPA) tidak sepenuhnya ditinggalkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Fenomena ini dikenal sebagai

persistensi OPA, yaitu bertahanya karakteristik birokrasi klasik dalam tata kelola administrasi publik modern. Persistensi tersebut menegaskan perubahan paradigma administrasi publik yang berlangsung secara evolusioner, sehingga paradigma baru tidak sepenuhnya menggantikan paradigma lama, tetapi justru mengadopsi dan mengadaptasi unsur-unsur paradigma lama yang dianggap masih relevan.

Elizabeth dalam Nugraha (2018:62) menjelaskan istilah persistensi diartikan sebagai “ketetapan” dan “berulang secara konstan”, bukan berarti tidak terjadi perubahan. Tetapi terdapat kecenderungan bagi beberapa ciri untuk tetap, tidak berubah, atau mempunyai bentuk yang relatif tidak berubah. Dalam konteks organisasi “persistensi” berarti pola, struktur, atau cara kerja lama yang terus bertahan dan berulang dari waktu ke waktu, meski lingkungan dan tuntutan sudah berubah. Persistensi OPA ini lebih banyak ditemukan dalam organisasi sektor layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, layanan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, pendidikan, dan sejumlah organisasi/instansi layanan publik.

Ketika tugas pemerintahan semakin meningkat karena semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas layanan, dimana kekuasaan pemerintahan juga semakin besar, semakin terlihat pula kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini administrasi dan birokrasi publik seringkali dianggap sebagai faktor penyebabnya (Thoha, 2008:87).

Oleh karena itu prinsip-prinsip OPA yang masih relevan, seperti supremasi hukum, akuntabilitas, profesionalisme

aparatur, dan kepastian prosedur, masih perlu dipertahankan agar menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hal tersebut kajian persistensi *Old Public Administration (OPA)* menjadi penting untuk dikaji karena OPA dapat memberikan manfaat dalam menjaga kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan akuntabilitas administratif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk persistensi OPA, faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungannya, serta implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia.

Hal ini dilakukan karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Good Governance, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, atau inovasi pelayanan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menjelaskan mengapa karakteristik *Old Public Administration* tetap bertahan di tengah berkembangnya paradigma Sound Governance. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis persistensi *Old Public Administration (OPA)* dalam praktek administrasi publik Indonesia di tengah berkembangnya paradigma administrasi publik kontemporer, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan karakteristik birokrasi klasik masih bertahan, serta menjelaskan implikasinya terhadap kemampuan organisasi publik dalam mewujudkan pelayanan yang adaptif, inovatif, partisipatif, dan kolaboratif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk

memberikan gambaran persistensi atau bertahannya paradigma *Old Public Administration (OPA)* dalam praktek pelayanan publik di Indonesia ditengah dinamika paradigma *Sound Governance (SG)*.

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang dikumpulkan melalui literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur terkait paradigma OPA, SG, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Dengan studi kepustakaan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun kerangka teori, melalui metode ini, peneliti dapat menggali wawasan dari berbagai sumber literatur yang sudah tersedia, mencakup teori, konsep, maupun hasil penelitian terdahulu (Arianto, 2025)

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, yang mencakup identifikasi tema-tema utama dalam literatur dan praktek penyelenggaraan pelayanan publik, perbandingan antara teori dan praktek di lapangan serta penarikan kesimpulan mengenai bagaimana paradigma OPA dapat bertahan bahkan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan di era *Sound Governance*.

C. HASIL PENELITIAN

Old Public Administration (OPA) yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, dan Max Weber menempatkan birokrasi sebagai instrumen utama negara yang bekerja melalui struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, sentralisasi kewenangan, serta kepatuhan

terhadap aturan formal. Model ini dinilai mampu menciptakan kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam menghadapi tantangan pemerintahan kontemporer, pendekatan tersebut dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat.

Sebaliknya, *Sound Governance* (Farazmand, 2004) menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan inovasi, adaptabilitas organisasi, kolaborasi multipihak, kapasitas kelembagaan sebagai elemen utama tata kelola pemerintahan. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, tetapi sebagai penggerak kolaborasi yang mampu membangun sinergi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada kedua teori tersebut, salah satu tantangan administrasi publik saat ini adalah pergeseran kebutuhan masyarakat, semakin banyak tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas sehingga diperlukan layanan yang cepat, tepat, berbasis informasi dan teknologi. Akibatnya pemerintah dituntut untuk beradaptasi, namun seringkali menjadi sulit karena kekakuan dan struktur birokrasi yang hierarkis serta keterbatasan sumber daya (Zuhdi, 2025:35).

Berkaitan dengan hal tersebut, Wilson (Thoha, 2008:72) menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya mempunyai struktur mengikuti model bisnis dalam memberikan pelayanan publik, menjaga keamanan, membuat regulasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Konsep ini yang dikenal dengan *Old Public Administration*. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, yang dilaksanakan secara netral, professional, dan lurus.

Paradigma OPA tidak bisa dipisahkan dari tiga pemikiran utamanya, yaitu paradigma dikotomi politik-administrasi-Nicholas Henry, *rational-model* Herbert Simon dan teori pilihan publik (Jaya, 2021). Paradigma dikotomi politik-administrasi didasarkan pada dua gagasan utama. Pertama, politik dan administrasi merupakan dua ranah yang berbeda. Politik berperan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik, sedangkan administrasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional. Oleh karena itu, kedua fungsi tersebut harus dipisahkan agar administrasi dapat bekerja secara netral tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Kedua, setiap pimpinan dalam organisasi administrasi dituntut mampu menyusun struktur organisasi serta merancang strategi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pandangan tersebut, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen yang dikemukakan oleh Gulick melalui konsep POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting*, dipandang sebagai prinsip-prinsip yang bersifat universal sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan organisasi.

Berdasarkan konsep *rational model* dan *public choice* di atas, ide inti dari OPA dapat berlangsung pada semua sektor kehidupan. ide tersebut terdiri dari :

1. Titik perhatian pemerintah adalah jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
2. *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
3. Administrasi publik memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan kebijakan publik.
4. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
5. Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
6. Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh pejabat dan hierarki atas organisasi.
7. Nilai-nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya sangat terbatas.
9. Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting*, dan *budgeting*. (Thoha, 2008 : 73-74)

Selanjutnya menurut Herbert Simon, tindakan manusia dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh tingkat rasionalitas yang dimilikinya. Individu yang bertindak berdasarkan pertimbangan rasional disebut sebagai manusia administratif, yaitu seseorang yang mengambil keputusan dan

berperilaku secara logis dengan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi tujuan pribadinya. Sedangkan Teori pilihan publik (*public choice theory*) merupakan salah satu landasan penting dalam paradigma OPA. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu cenderung bertindak secara rasional dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat atau keuntungan terbesar bagi dirinya ketika mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, perilaku aktor dalam sektor publik, baik birokrat, politisi, maupun masyarakat, dipandang didasarkan pada pertimbangan kepentingan dan manfaat yang ingin dicapai.

Kettunen (dalam Hasan, 2025:7) menyampaikan bahwa paradigma klasik administrasi berperan dalam membentuk dasar administrasi yang menekankan pada prosedur yang jelas dan pembagian kerja yang efisien. Hal ini menegaskan bahwa organisasi akan mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi apabila setiap individu memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang telah ditetapkan secara tegas. Selain itu, adanya hierarki organisasi dan pengawasan yang teratur memungkinkan koordinasi kerja berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, paradigma klasik menjadi landasan bagi pengembangan sistem administrasi modern, terutama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang tertib, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Walaupun *Old Public Administration* (OPA) sering dikritik karena dinilai terlalu birokratis, kurang fleksibel, serta belum mampu merespons perubahan dan mendorong inovasi secara optimal, berbagai prinsip yang diusungnya masih

tetap dipertahankan dalam praktik administrasi publik. Hal ini disebabkan oleh sejumlah nilai dasar OPA yang masih relevan, seperti :

1. Kebutuhan akan stabilitas dan kepastian hukum: Prinsip-prinsip OPA, seperti penerapan aturan yang formal, prosedur yang terstandarisasi, dan struktur hierarki yang jelas, masih dibutuhkan untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pelayanan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Penerapan prinsip tersebut menjadi sangat penting, terutama pada sektor-sektor strategis seperti perpajakan, peradilan, dan keamanan, yang menuntut kepastian hukum, ketertiban, serta pengawasan yang ketat.
2. Warisan institusional yang kuat: Banyak negara mengembangkan sistem birokrasi modern dengan berlandaskan pada model birokrasi Weberian. Oleh karena itu, struktur, nilai, dan budaya organisasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak dapat diubah secara cepat. Proses perubahan memerlukan waktu yang panjang karena harus disertai dengan penyesuaian terhadap sistem, tata kelola, serta budaya kerja yang telah mengakar dalam organisasi pemerintahan.
3. Fungsi regulasi dan pengawasan: Pendekatan OPA yang menekankan kepatuhan terhadap aturan serta sistem pengawasan yang berlapis masih memiliki relevansi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pendekatan tersebut berperan penting dalam mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta memastikan terpenuhinya standar minimum pelayanan publik. Dengan

demikian, mekanisme regulasi dan kontrol yang menjadi ciri OPA tetap dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

4. Keterbatasan paradigma baru: Meskipun *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada efisiensi, inovasi, dan partisipasi masyarakat, kedua paradigma tersebut belum sepenuhnya menggantikan peran *Old Public Administration* (OPA). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sering kali diterapkan pendekatan hibrida yang mengombinasikan prinsip efisiensi dan kinerja dari NPM serta nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik dari NPS dengan struktur birokrasi, hierarki, dan kepatuhan terhadap aturan yang menjadi karakteristik utama OPA

Persistensi *Old Public Administration* (OPA) dalam konteks pelayanan publik di Indonesia tercermin dari masih kuatnya penerapan karakteristik birokrasi klasik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari struktur organisasi yang tetap bersifat hierarkis dengan pola pengambilan keputusan secara *top-down*. Selain itu, proses pelayanan publik masih didominasi oleh prosedur yang formal, persyaratan administrasi yang kompleks, serta penekanan pada kepatuhan terhadap aturan dan standar operasional. Dalam praktiknya, masyarakat umumnya masih diposisikan sebagai penerima layanan, sehingga keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan relatif terbatas. Di sisi lain, aparatur pemerintah cenderung lebih berorientasi pada pelaksanaan prosedur dan ketentuan yang berlaku daripada

mengedepankan penyelesaian masalah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara inovatif dan responsif.

D. KESIMPULAN

Dalam perspektif klasik *Old Public Administration* (OPA), administrasi publik dipahami sebagai suatu rangkaian institusi pemerintahan, mekanisme, prosedur, sistem, struktur organisasi, serta pola tindakan aparatur yang berfungsi untuk mengelola urusan publik demi memenuhi kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi birokrasi, administrasi publik menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat aturan yang memiliki legitimasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta prinsip rasionalitas-legal. Pelaksanaan administrasi publik didukung oleh keahlian, sikap netral, kesinambungan pelayanan, efektivitas, ketepatan, kepastian prosedur, penerapan standar kerja, integritas, dan profesionalisme aparatur guna memberikan pelayanan yang optimal serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Persistensi OPA dalam pelayanan publik Indonesia terlihat dari diantaranya struktur birokrasi masih sangat hierarkis dan *top-down*, prosedur pelayanan sangat formal, penuh dokumen, dan berorientasi pada kepatuhan aturan (*red tape*), masyarakat lebih diposisikan sebagai klien/penerima pasif, bukan mitra yang dilibatkan, pegawai publik lebih fokus menjalankan aturan daripada pecahkan masalah masyarakat. Persistensi tersebut memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti stabilitas dan kepastian aturan, pemisahan politik-administrasi, sehingga pelayanan publik tidak terganggu oleh kepentingan politik, dan perlindungan bagi birokrat, dimana

status pegawai yang relatif aman, gaji dan tunjangan, serta prosedur formal dapat melindungi dari tekanan politik dan memberi ruang profesionalisme. Sedangkan kelemahan OPA, diantaranya birokrasi kaku dan lamban, kurang responsif dan tertutup, sentralistik dan top-down, fokus pada rutinitas, bukan inovasi, kualitas pelayanan publik terbatas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hasan, zainullah Hasan, Zakaria Habib Al-Ra'zie, Febryan Ajeng Ramdani, Nida Silvia Lestari, Indra Aditya Prayoga, Iskandar Iskandar, Sarinah Sarinah, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Lhery Swara Oktaf Adhania, Achmad Hariri, Auliya Gaffar Rahman. Administrasi Publik: Teori, Sistem, dan Praktik. 2025. Penerbit : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

Imanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371>

Kalalo, E., Putri, I. N., Mariana, L., & Arifin, A. L. 2024. The influence of public administration science paradigm shift in its realization good governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 5(2), 171–178. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.20185>. 2024

Kurniawan, Teguh. 2004. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan Npm Ke Good Governance. *JIANA, Jurnal Ilmu Adm Negara*. ISSN. 1411-948X, Volume 7, 1 Januari 2007, hal. 52-70

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Penerbit Kencana Prenadamedia Group. Yogyakarta.

Zuhdi, Sulaiman, Trio Saputro. 2025. Jejaring Kebijakan Paradigma Baru Administrasi Publik. Penerbit Widina Media Utama.

Silitonga, Anest Juliana. 2024. Transformasi Birokrasi Pemerintah : Pergeseran Paradigma Dari Era Klasik Ke Modern Dalam Penerapan Good Government Di Era Digital. *Journal Of Social, Justice And Policy*issn (Online): 2809-8080. ISSN: 2809-9540<https://ejournalsjp.lkispol.or.id> Volume 3 Number 6 November 2024. <https://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/3400/10/10.%20BAB%20II.pdf>.